

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XII/2015 Narkoba, Seksualitas dan Politik¹

Kamis, 15 Oktober 2015, 09:00 – 15:00

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok

RUMUSAN KULIAH

Oleh Hestu Prahara, M.Sc

Antropologi, sebagai bagian dari ilmu sosial seringkali dianggap sebagai ilmu yang hanya terbatas pada pembahasan isu-isu kebudayaan yang direduksi dalam bingkai imaji romantic mengenai masyarakat etnik tradisional. Padahal sudah sejak lama, karya-karya etnografi tidak hanya melulu membahas kelompok-kelompok etnis tradisional dan pedesaan melainkan juga kelompok-kelompok lain seperti masyarakat perkotaan, aparatus Negara, birokrat, development planner, bahkan ilmuwan sebagai subjek etnografi guna menjawab sebuah pertanyaan “what does it mean to be human?”. Karena itu, tidaklah mengherankan jika KML keduabelas ini mengambil tema diskusi “narkoba, seksualitas dan politik” yang didedikasikan untuk sebuah upaya perluasan cakrawala kemanusiaan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Geertz tentang tujuan dari studi etnografi. Dalam upaya tersebut, antropologi tidak hanya mengulas romantisme keharmonisan nilai-nilai budaya masyarakat tradisional tetapi juga negosiasi, konflik, dan kekuasaan.

Dalam diskusi mengenai Narkoba pada sesi pertama yang dilanjutkan dengan sesi kedua mengenai Seksualitas, kita lihat bahwa kuasa (power) tak terelakkan menduduki posisi sentral dalam pembahasan. Kuasa dalam hal ini tidak terbatas pada praktik politik formal yang didominasi oleh para elit dan politikus, namun juga operasionalisasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kuasa bekerja tak hanya di kantor-kantor pemerintah, ruang-ruang rapat di Gedung DPR/MPR, diskusi politikus dan para pengamat di stasiun-stasiun TV, tetapi juga di tempat-tempat lain seperti klinik methadone, rumah sakit, klinik bersalin, lokalisasi etc.

Melalui sejumlah teknik kepengaturan (governmentality) oleh negara, kuasa beroperasi dengan menelusup masuk ke alam bawah sadar kita dan berperan dalam membingkai realitas yang kita hidupi. Dengan demikian, kepengaturan membentuk suatu keadaan yang dibuat sedemikian teratur sehingga orang akan berbuat seperti apa yang seharusnya mereka perbuat tanpa mempertanyakan kembali mengapa mereka melakukannya.

Dalam diskusi mengenai seksualitas, Dewi Candraningrum memaparkan bahwa grand narrative (narasi agung/adiluhung) Negara mengenai Ibuisme, secara ironis, didirikan diatas ketertundukan para perempuan. Tak didapat dielakan lagi, ketertundukan tersebut adalah hasil dari serangkaian proses pendisiplinan dan kepengaturan yang dilakukan oleh penguasa. Ibuisme yang didirikan diatas ketertundukan perempuan, dalam hal ini hadir sebagai rezim nilai (regime of value) yang tak dapat dipungkiri lagi menjadi acuan moralitas kita, begitu hegemonic sehingga menjadi sebuah kelaziman yang jarang dipertanyakan kembali. Ibuisme, dalam hal ini kesuburan reproduktif dan kepatuhan

¹ Proceeding of ‘Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015’. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia or the writer. Paper can be downloaded in <http://fkai.org>

domestic adalah atribut penting dalam bangunan superioritas moral seorang perempuan. Patuh dan subur adalah kemuliaan. Mereka yang “gagal” menyematkan kedua atribut tersebut, (mandul dan liar), rentan terjerembab pada kehinaan. Ia menjadi objek penderita dari “nasihat” dalam acara-acara keluarga, masuk ke pusat-pusat rehabilitasi, dan tak terelakkan lagi eksklusi social dan pada akhirnya violence.

HIV AIDS di Indonesia juga lekat dengan kecurigaan pada mereka yang diidentifikasi sebagai pihak yang terbelakang secara moral (terkait dengan perilaku seksual) dan juga pendidikan. Politics of exclusion melatarbelakangi centang perentang penanganan HIV AIDS di Indonesia dan penjelasan atas keterpurukan masyarakat papua pada masalah HIV AIDS sangat terkait erat dengan persoalan kelas. Menurut Hilmar Farid, persoalan HIV AIDS ini pertama-tama harus dilihat sebagai persoalan medis. Campur baur kepentingan politik dan moral justru mengaburkan masalah dan kemudian yang terjadi adalah pembiaran.

Hal yang serupa juga terjadi pada para pengguna narkoba yang dalam hal ini terjerembab dalam lembah nestapakarena dianggap gagal dalam pemenuhan atribut moral yang mapan yakni bertubuh sehat dan produktif. Dalam narasi besar lainnya, para pengguna narkoba direpresentasikan jauh dari nilai-nilai kramat karakter bangsa. Serangkaian upaya pun dilakukan melalui proyek kepengaturan dan pendisiplinan, mulai dari rehabilitasi harm reduction dan kriminalisasi dengan ancaman penjara hingga hukuman mati.

Belajar dari apa yang dipaparkan oleh Ignasius Praptoraharjo dalam pembahasan mengenai kehidupan para pengguna narkoba, kita mendapati bahwa nilai-nilai dalam kebudayaan yang seringkali menjadi ‘makanan’ para ahli antropologi, bukanlah entitas yang abstrak dan mengawang-awang yang tidak berkenaan dengan realitas empiric konkrit. Nilai-nilai well-being (menjadi anak yang baik, orang tua yang baik, suami yang baik dan seterusnya), selalu terkait dengan struktur relasi produksi mana kita terlibat yang turut serta memberi kontur pada regime of value yang kemudian berlaku.

Pada masyarakat kita misalnya, konsepsi mengenai arah lintasan hidup yang mapan (yang terinspirasi dari nilai-nilai khas masyarakat industrialist) adalah “seorang anak diharapkan mengenyam pendidikan yang baik (bersekolah setinggi-tingginya) agar kemudian dapat terserap dalam pasar tenaga kerja (syukur-syukur mendapat jabatan tinggi sebagai hasil dari investasi pendidikan tinggi), memperoleh stabilitas dan keamanan finansial (gaji rutin berikut pension), menikah, bereproduksi (berketurunan), lalu menikmati hari tua dengan dana pensiun sebagai buah dari partisipasi di dalam pasar tenaga kerja. Pada masyarakat berburumeramu atau agraris tentu memiliki konsepsi mengenai arah lintasan hidup yang berbeda dengan regime of value yang berbeda pula. Barang siapa terpeleset jauh dari arah lintasan hidup yang dianggap mapan tersebut (entah karena DO, tidak diterima PNS, atau terjerembab dalam dunia Narkoba) rentan terhadap deraan nasihat dari mereka yang merasa superior secara moral (karena hidup sesuai dengan arah lintasan hidup yang mapan) atau hidup dalam perasaan bersalah karena menjalani hidup yang dianggap “aneh-aneh”, “nyeleneh”, atau lebih buruk “immoral”.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sari Damar Ratri, upaya perehabilitasian para pengguna narkoba via harm reduction tak lain adalah upaya “mengembalikan” mereka yang terpeleset dari arah lintasan hidup yang diharapkan dalam regime of value masyarakat kita. Dengan substitusi zat methadone dan subuxon, diharapkan dapat

mengembalikan para pecandu putau agar tetap produktif. Pengembalian produktifitas menjadi penekanan utama dalam upaya tersebut. Ketimpangan pun terjadi dalam implementasinya, dimana kualitas hidup para pecandu yang menaruh harapan besar untuk kemudian “lulus” dan terintegrasi ke dalam masyarakat masih sulit tercapai. Hal ini terjadi karena masih kuatnya stereotype negative terhadap mereka dan sulitnya memperoleh kehidupan yang stabil dan aman dengan memperoleh pekerjaan. Meski telah beralih dengan mengonsumsi zat yang legal, para pecandu tetap berada di ruang tunggu dan kehilangan segalanya.

Demikian beberapa catatan yang bisa saya berikan sebagai penutup dari KML ke 12. Catatan-catatan tersebut saya akui masih jauh dari sebuah rumusan yang padu apalagi memberikan kontribusi pada solusi-solusi teknis atas masalah yang dibicarakan. Atas persoalan yang terakhir ini, pertanyaan yang seringkali muncul: lalu apa yang harus dilakukan? Apa solusinya? Akademisi bisanya hanya bicara!

Mengutip seorang pemikir kritis, Karl Marx, dalam tesis kesebelasnya atas Fuerbach yang mengatakan bahwa “para filsuf hanya sibuk menginterpretasi dunia, padahal yang terpenting adalah merubahnya”. Tesis tersebut, tak terelakkan lagi bekerja dalam kehidupan nyata, dimana ‘bertindak’ (mulai dari demonstrasi/turun ke jalan, blusukan, posting berita di media social, hingga menandatangani petisi online) dianggap lebih baik daripada ‘menginterpretasi’. Pertanyaannya kemudian saya kembalikan lagi pada sang penanya tersebut: apakah para filsuf dan juga kita sudah menginterpretasi dunia dengan secara paripurna sehingga kita harus mendahulukan tindakan dan berhenti berfikir kritis?